

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, akuntabilitas program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas belum optimal karena masih terdapat beberapa factor penghambat dalam pencapaian akuntabilitas. Penelitian ini diukur dengan model Hopwood dan Tomkins (dalam Mahmudi, 2013) yang memiliki 4 (empat) dimensi akuntabilitas, yakni akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas proses, akuntabilitas pogram, dan akuntabilitas hukum dan kejujuran, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas dalam mengatasi pengangguran sudah cukup baik, tetapi akuntabilitasnya belum optimal, dikarenakan belum adanya kebijakan yang tertulis dari Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, sehingga Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas belum memiliki tolak ukur dalam mengeluarkan program yang baik.

2. Akuntabilitas Proses

Secara regulasi dan administrasi, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas belum dapat dikatakan akuntabel. Hal tersebut dikarenakan

masih adanya keterbatasan dalam formulasi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara jelas dan tertulis terkait penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Meskipun tidak memiliki SOP yang formal, pelayanan yang diberikan kepada pencari kerja dan pemberi kerja semua telah termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Pada tahap perencanaan sampai pelaksanaan program, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas dapat dinilai akuntabel. Hal tersebut, dapat dinilai berdasarkan adanya kesesuaian antara rencana strategis, landasan hukum dan realisasi program. Namun, program yang diselenggarakan belum menghasilkan hasil yang optimal untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja. Kondisi tersebut, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam menyesuaikan kualifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia. Sehingga, hal tersebut masih menjadi alasan sulitnya meningkatkan penempatan tenaga kerja.

4. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pada aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas telah memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang sesuai, sehingga dapat dikatakan akuntabel. Namun, Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas belum maksimal dalam melakukan transparansi dan pertanggungjawaban

yang dapat diakses dengan mudah oleh publik, unggah data informasi SAKIP di situs resmi masih jauh dari unggah terbaru.

5.2. Implikasi

Merujuk pada kesimpulan hasil penelitian, akuntabilitas Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas dalam program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja telah berjalan baik, maka berikut beberapa implikasi dari penulis:

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terkait perumusan kebijakan yang mengatur penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut penting, untuk dijadikan acuan pemberian pelayanan publik oleh Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas
2. Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas, perlu adanya pengawasan dan evaluasi lebih lanjut terkait pembuatan regulasi atau formulasi SOP secara formal dan tertulis untuk keberlanjutan tindakan pelayanan publik.
3. Ketersediaan kesempatan kerja belum sepenuhnya menyeluruh untuk pendidikan tertentu. Sehingga, perlu diadakannya evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi lowongan pekerjaan yang berlaku untuk seluruh latar belakang pendidikan.
4. Keterbatasan sumber daya manusia untuk terqualifikasi lowongan pekerjaan yang tersedia, diperlukannya kegiatan pengembangan

keterampilan/pelatihan yang sesuai dengan teknologi modern, agar calon tenaga kerja lebih siap menghadapi tuntutan pasar kerja. Selain itu, peserta pelatihan yang telah lulus uji kompetensi, sebaiknya dapat disalurkan secara langsung ke perusahaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga mampu menekan angka pengangguran di Kabupaten Banyumas.

5. Perlunya membangun kemitraan yang lebih luas dengan perusahaan swasta untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja, sehingga dapat lebih banyak menyerap calon tenaga kerja yang tersedia.
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi lebih lanjut terkait program-program yang diselenggarakan sehingga dapat berjalan sesuai dengan target dan mencapai hasil yang optimal

